

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Fokus masalah dari penelitian ini adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Terbukti dari masih terdapat anggota TPK yang dalam menjalankan tugasnya belum sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Hal ini menjadi tantangan bagi TPK untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif, sehingga dapat terjalin kinerja yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mengajukan pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana tujuan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, bagaimana garis wewenang dan tanggungjawab pada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, bagaimana program dan kebijakan dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, bagaimana komunikasi dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dan bagaimana

Kepemimpinan dan Pengawasan di dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Guna menjawab pertanyaan dari penelitian ini, dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode *access to the organization*, observasi, wawancara, serta dokumen dan material audiovisual. Wawancara dilakukan bersama beberapa informan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yaitu kepada Ibu Fatima Erni selaku Ketua TP-PKK sekaligus Ketua TPK Desa Bojong yang dilakukan pada tanggal 03 April 2024, Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa yang dilakukan pada tanggal 01 April 2024, dan Ibu Neni Herawati selaku Kader KB yang dilakukan pada tanggal 02 April 2024.

Guna mengetahui bagaimana koordinasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur peneliti melaksanakan penelitiannya terkait koordinasi didukung juga oleh Teori D. Chandra Bose (2021), ada beberapa teknik koordinasi yang efektif, yaitu tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggungjawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan komprehensif, kerja sama, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif.

Maka dari itu hasil penelitian tentang Koordinasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yaitu sebagai berikut:

**a. Pelaksanaan Koordinasi Pada Aspek Tujuan yang Jelas (*Clearly Defined Goals*)**

Mengenai ada tidaknya tujuan yang jelas, mengapa perlu adanya pendampingan terhadap calon pengantin/keluarga beresiko stunting, apa tujuan dan bagaimana upaya TPK Desa Bojong dalam mencapai tujuan tersebut peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Pendampingan terhadap calon pengantin perlu dilakukan karena dengan pendampingan akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik, sehingga nantinya para calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Tujuan TPK desa Bojong yaitu untuk mengetahui dan memastikan lebih awal faktor penyebab stunting bagi calon pengantin yang siap hamil dan melahirkan, dan untuk mempercepat penurunan stunting sehingga baduta dan balita sehat dan cerdas. Upayanya yaitu dengan cara memberikan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi), kemudian kunjungan ke rumah-rumah yang memiliki catin, ibu hamil, pasca salin dan baduta, serta memberikan PMT (pemberian makanan tambahan) untuk ibu hami kek dan anak yang kurang berat badanya dan gizi buruk.

Hal yang serupa dikatakan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Pendampingan terhadap calon pengantin dilakukan karena harus mempersiapkan kehamilan agar sehat dan terpantau, jadi walaupun ada kasus-kasus seperti bumil kek itu bisa cepat tertangani. Tujuan TPK Desa Bojong yaitu untuk mendeteksi faktor stunting dan melakukan pencegahan stunting. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan kunjungan rumah kepada keluarga yang memiliki bayi berusia di bawah 2 tahun, lalu ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, lalu mencatat informasi penting seperti jika ada penemuan-penemuan kasus untuk dikoordinasikan dengan tim mengenai kesehatannya secara umum.

Informasi ditambahkan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

Pendampingan terhadap calon pengantin sangat penting karena untuk memastikan kondisi dari calon pengantin itu agar bisa menyiapkan dirinya secara mental yang sehat dengan upaya kesehatan dan peningkatan status gizi, sehingga pada saat melakukan pernikahan calon pengantin tersebut sudah siap secara mental dan dalam kondisi yang ideal. Tujuan TPK Desa Bojong yaitu untuk menurunkan angka keluarga beresiko stunting yang ada di Desa Bojong, upaya yang dilakukannya yaitu melakukan pendekatan dan pendataan kepada keluarga yang beresiko stunting, setelah pendataan tersebut terkumpul baru kita melakukan pendampingan ataupun KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada individu atau kelompok, kemudian melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa Bojong dan pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Desa Bojong yang sudah melakukan MOU untuk mengadakan PMT yang nantinya akan diberikan kepada sasaran keluarga yang beresiko stunting.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tujuan dari pendampingan terhadap calon pengantin atau keluarga yang beresiko stunting yaitu untuk mempersiapkan mental dan kesehatan calon pengantin yang nantinya akan mengandung dan melahirkan keturunan, sehingga pasca melahirkan nanti keadaan ibu dan bayi sehat dan bebas dari kondisi stunting. Kemudian tujuan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan stunting agar dan untuk menurunkan angka stunting, sehingga tercipta baduta (bayi di bawah dua tahun) dan balita (bayi di bawah lima tahun) yang sehat. TPK Desa Bojong melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, seperti memberikan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada calon pengantin dan keluarga yang beresiko stunting dan juga kepada masyarakat, melakukan pendekatan dan pencatatan data, melakukan kunjungan ke rumah-rumah yang terdapat baduta atau balita yang terindikasi stunting, memberikan PMT (pemberian makanan tambahan) untuk memenuhi gizi anak. Kemudian melakukan koordinasi dengan tim untuk tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya. Dari observasi peneliti, terdapat berbagai sosialisasi dari

pemerintah melalui webinar ataupun pertemuan bersama Tim Pendamping Keluarga untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai stunting. Kemudian dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting, TPK Desa Bojong juga melakukan pemantauan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, baduta, hingga balita melalui kegiatan posyandu yang dilaksanakan di setiap RWnya.

**b. Pelaksanaan Koordinasi Pada Aspek Garis Wewenang dan Tanggungjawab yang Jelas (*Clear Lines Of Authority And Responsibility*)**

Mengenai pembagian tugas yang dilaksanakan oleh TPK Desa Bojong dan tugas apa saja yang menjadi tanggungjawab dari Kader PKK, Bidan Desa, dan Kader KB, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Pembagian tugas untuk TPK Desa Bojong yaitu terdiri dari Bidan Desa, Kader PKK, dan Kader KB, bidan desa memiliki tugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi layanan kesehatan, kader PKK itu sebagai fasilitator pelayanan bagi keluarga atau memfasilitasi pemberian bantuan sosial, kader kb itu biasanya melakukan penyuluhan-penyuluhan. Ketua TPK desa bojong bertanggungjawab sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan bagi keluarga, seperti melakukan pola asuh tumbuh kembang anak atau memastikan bayi mendapatkan asi eksklusif kemudian bayi 6 bulan keatas mendapatkan mpasi.

Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa memberikan informasi mengenai tugas dari bidan pada wawancara tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Pembagian tugas itu setiap tim terdiri dari 3 orang yaitu kader PKK, Bidan, dan kader KB. Setiap tim itu ada di setiap RW yang melacak orang-orang yang beresiko stunting, insya allah di desa bojong terdapat 18 tim. Tugas bidan yaitu melakukan pemeriksaan atau *screening* awal faktor resiko stunting pada ibu hamil, bayi, kemudian melakukan asuhan kebidanan, terus melakukan pendampingan kepada sasaran yang beresiko stunting.

Informasi ditambahkan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

Untuk pembagian tugasnya terdiri dari kader PKK, kader KB dan Bidan Desa, yaitu melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas yang meliputi penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan, serta fasilitasi penerimaan bantuan sosial. Tugas kader KB itu melakukan pendampingan secara berkala kepada sasaran, kemudian melakukan pelaporan yang dilaporkan ke aplikasi elsimil dan pelaporan secara visum juga yang diketahui oleh kepala desa dan dinas terkait.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa anggota TPK Desa Bojong telah mengetahui tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya. Dimana setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing, yaitu Kader PKK memiliki tugas pendampingan dan sebagai fasilitator pelayanan bagi keluarga atau memfasilitasi pemberian bantuan sosial. Bidan Desa memiliki tugas untuk pendampingan dan pemberi layanan kesehatan. Kader KB memiliki tugas pendampingan dan melakukan pelaporan data yang di input melalui aplikasi elsimil yang digunakan khusus data calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan serta baduta dan balita. Dan ketua TPK Desa Bojong memiliki tugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan keluarga, dikarenakan ketua TPK Desa Bojong merupakan bagian dari kader PKK. TPK Desa Bojong memiliki 10 tim yang terdiri dari tiga orang dan dibagi untuk 18 RW, sehingga setiap tim melakukan penginputan data ke dalam elsimil sesuai dengan data yang didapatkan oleh tim tersebut. Namun masih terdapat beberapa tim yang tidak menginput data-data tersebut ke dalam elsimil, karena terkendala alat komunikasi yang digunakan kurang memadai.

Mengenai garis wewenang dan bagaimana tugas dan wewenang yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03

April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Garis wewenangnya yaitu TPK melaporkan hasil pendampingan secara visum, pertama kepada koordinator desa, kemudian ke koordinator kecamatan atau UPTD secara visum dan elsimil, kemudian ke dinas terkait. Visum itu mencatat data-data dari ibu hamil, pasca salin, baduta yang ditulis datanya secara manual. Tugas utama TPK yaitu melakukan penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan, dan fasilitas pemberian bantuan sosial.

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara tanggal 01 April 2023 sebagai berikut:

Kami melaporkan hasil temuan-temuan di lapangan kepada ketua UPTD P5A. Tugas dan wewenang TPK yaitu melakukan pemeriksaan dan mencatat perkembangan kehamilan, kesehatan ibu dan memberikan informasi, serta memberikan dukungan yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Informasi ditambahkan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

Garis wewenang TPK yaitu melaporkan hasil pendampingan kepada TPK kecamatan atau UPTD dan dinas terkait dalam hasil visum yang dimuat kedalam aplikasi elsimil. Tugas dan wewenang TPK yaitu melakukan pendampingan secara berkala kepada keluarga yang beresiko stunting atau kunjung ke rumah-rumah keluarga yang beresiko stunting.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa garis wewenang TPK Desa Bojong bertanggungjawab kepada UPTD P5A dan dinas terkait dengan melaporkan data atau kasus-kasus stunting yang terjadi di Desa Bojong melalui aplikasi elsimil. Kemudian tugas dan wewenang TPK Desa Bojong adalah melakukan pendampingan, penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi pemberian bantuan sosial, melakukan pemeriksaan, serta memberikan dukungan kepada catin hingga keluarga beresiko stunting. Berdasarkan hasil observasi peneliti, TPK Desa Bojong mengunjungi rumah baduta yang terindikasi stunting

untuk memberikan pendampingan, penyuluhan hingga pemberian makanan tambahan untuk memenuhi gizi anak.

**c. Pelaksanaan Koordinasi Pada Program dan Kebijakan yang Tepat dan Komprehensif (*Precise And Comprehensive Programs And Policies*)**

Mengenai program yang dimiliki oleh TPK dan bagaimana TPK Desa Bojong dalam melaksanakan program tersebut, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Program-programnya yaitu yang pertama pendampingan kepada calon pengantin untuk siap hamil dan melahirkan, kemudian program kedua adalah pendampingan ibu hamil supaya tidak beresiko kek atau kurang energi kronis, yang ketiga adalah program pendampingan pasca salin supaya ibu dan bayi sehat.

Informasi serupa juga disampaikan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Program-programnya yaitu program pendampingan terhadap catin, program pendampingan terhadap ibu hamil, ibu bersalin dan pasca salin, serta bayi baru lahir dengan cara memantau setiap bulan dan melakukan pelaporan apabila terjadi permasalahan atau penemuan-penemuan kasus yang beresiko stunting.

Informasi yang sama disampaikan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

Program yang pertama adalah kunjungan rumah kepada calon pengantin dan keluarga yang beresiko stunting, yang keduanya melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada catin dan keluarga yang beresiko stunting.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa TPK memiliki tiga program utama yaitu, pendampingan terhadap calon pengantin, pendampingan



terhadap ibu hamil, dan pendampingan terhadap ibu pasca persalinan serta baduta dan balita. Selain itu terdapat program kunjungan rumah dan penyuluhan terhadap calon pengantin hingga keluarga yang beresiko stunting. Berdasarkan hasil observasi TPK Desa Bojong selain berkunjung ke rumah warga, TPK Desa Bojong juga rutin melakukan pendampingan terhadap ibu hamil dan ibu pasca persalinan serta baduta dan balita di posyandu sehingga dapat terpantau perkembangannya.

Mengenai bagaimana pendampingan dapat mencegah stunting pada balita, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Pendampingan dapat mencegah stunting pada balita yaitu misalnya dengan kunjungan kepada keluarga yang memiliki balita dengan memberikan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) serta pemberian makanan tambahan kepada balita yang beresiko stunting.

Informasi serupa disampaikan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Karena dengan pendampingan itu kita bisa mengetahui kondisi sasaran dan memberikan upaya-upaya apabila diketahui adanya permasalahan-permasalahan, jadi bisa di deteksi secara dini. Misalnya bisa dengan pemberian PMT untuk mencegah stunting atau edukasi-edukasi agar ibu hamil atau catin bisa mempersiapkan diri agar tidak terjadi stunting.

Informasi ditambahkan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

“Dengan cara pemberian makanan tambahan dengan gizi yang seimbang secara berkala.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa melalui pendampingan yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong, dapat diketahui kondisi

sasaran sehingga dapat dilakukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan kondisi sasaran tersebut. Misalnya dengan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil keak atau balita yang terindikasi stunting, memberikan edukasi untuk calon pengantin dan ibu hamil untuk mempersiapkan kehamilan dan kelahiran agar tidak terjadi stunting.

#### **d. Pelaksanaan Koordinasi Pada Aspek Kerjasama (*Cooperation*)**

Mengenai kerjasama yang dilakukan oleh anggota TPK Desa Bojong dalam melaksanakan tugasnya, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

“Kerjasama yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong itu walau sudah ada tugasnya masing-masing, tapi tetap saling komunikasi dan berkoordinasi.”

Informasi serupa disampaikan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara pada tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Kerjasama setiap tim, jadi masing-masing sudah mempunyai tugas masing-masing juga ya bidan melakukan pemeriksaan, PKK melakukan penyuluhan, dan kader KB itu juga mempunyai tugas masing-masing, setelah mengetahui tugas masing-masing kita melaporkan bersama-sama, dan mengevaluasi juga apabila ada kesenjangan atau masalah pada sasaran yang beresiko stunting.

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

“Kita bekerjasama dengan solid dalam satu tim”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa TPK Desa Bojong melakukan kerjasama meskipun setiap anggota telah memiliki tugasnya masing-masing, dengan cara berkoordinasi dan berdiskusi mengenai permasalahan yang

terjadi, kemudian melakukan evaluasi bersama-sama untuk mengatasi masalah pada sasaran yang beresiko stunting. Berdasarkan hasil observasi peneliti di posyadu, TPK Desa Bojong bersama-sama melakukan pendampingan kemudian melakukan diskusi terkait penyebab serta tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat perkembangan pada anak yang teridikasi stunting.

**e. Pelaksanaan Koordinasi Pada Aspek Komunikasi yang Efektif (*Effective Communication*)**

Menenai proses komunikasi yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong dan bagaimana TPK Desa Bojong dalam melakukan komunikasi yang membangun, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Proses komunikasi yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong yaitu dengan adanya grup whatsapp TPK, adanya pertemuan semua anggota TPK Desa Bojong yang dilakukan minimal 1 bulan sekali. Ketika ada pertemuan kita mendiskusikan masalah-masalah yang ada di lapangan dan meminta nasihat atau masukan masalah dari orang yang berkompeten dan dari petugas kecamatan atau kabupaten.

Informasi serupa disampaikan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Komunikasi setiap tim bisa dilakukan via telpon atau via chat whatsapp, atau bisa melakukan pertemuan-pertemuan yang biasanya dilakukan setiap bulan. Biasanya bidan memberikan penjelasan mengenai penemuan medis kepada anggota TPK yang lain dalam pertemuan yang diadakan. Pokoknya koordinasi setiap ada penemuan masalah, terus selalu ngobrol intinya komunikasi, kalo misalnya ada apa-apa langsung laporkan.

Informasi ditambahkan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

Kita melakukan komunikasi dengan cara mengadakan whatsapp grup TPK dan pertemuan semua kader TPK yang diadakan minimal 1 bulan sekali. Untuk komunikasi yang membangun, TPK membuat dan menempel pamflet-pamflet ataupun poster-poster atau banner yang dipasang di titik-titik tertentu, supaya masyarakat bisa melihat informasi-informasi tentang stunting.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa TPK Desa Bojong melakukan pertemuan setidaknya 1 bulan sekali untuk membahas atau mendiskusikan terkait penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain itu TPK Desa Bojong juga menggunakan grup chat untuk bertukar informasi. Untuk komunikasi yang membangun TPK Desa Bojong membuat pamflet yang berisikan informasi mengenai pencegahan stunting, sehingga masyarakat dapat lebih perhatian terhadap kondisi kesehatan ibu dan anak. Selain itu Bidan juga selalu memberikan informasi mengenai penemuan medis kepada anggota TPK agar dapat menemukan solusi bersama-sama. Berdasarkan observasi peneliti, terlihat pada saat pelaksanaan posyandu anggota TPK Desa Bojong berkomunikasi ringan membahas mengenai salah satu balita dengan perkembangan yang lambat. Setiap anggota terlihat memahami kondisi tersebut sehingga berusaha mencari tahu penyebab dan solusi untuk perkembangan anak tersebut.

Mengenai apakah TPK Desa Bojong melakukan komunikasi dengan teratur dan bagaimana mempertahankan komunikasi agar berjalan dengan konsisten, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Ya teratur, alhamdulillah ketika ada pembuatan laporan, dan pertemuan yaitu satu bulan sekali, cara mempertahankannya yaitu tadi teratur kita bertemu dan selalu berkomunikasi walaupun melalui grup whatsapp.

Informasi serupa disampaikan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Iya selalu teratur, pokoknya ya tadi setiap ada penemuan kasus ataupun tidak ada, kan tidak setiap bulan terjadi kasus seperti hamil kek atau misalnya ada kasus stunting jadi kita komunikasilah yang baik, intinya komunikasi aja setiap bulan atau setiap ada kasus.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

“Iya alhamdulillah untuk TPK Desa Bojong kita selalu mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa TPK Desa Bojong selalu mengadakan pertemuan yang teratur, dan sebisa mungkin untuk selalu berkomunikasi meski melalui grup chat, anggota TPK berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik agar dapat bertukar informasi satu sama lain.

**f. Pelaksanaan Koordinasi Pada Aspek Kepemimpinan dan Pengawasan yang Efektif (*Effective Leadership And Supervision*)**

Mengenai bagaimana TPK Desa Bojong dalam memberikan inspirasi dan motivasi terhadap anggota TPK ataupun terhadap calon pengantin hingga keluarga beresiko stunting, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

“Mungkin dengan pendekatan, dan komunikasi, dan memberikan edukasi, contohnya tentang manfaat menyusui, mpasi dengan gizi seimbang.”

Informasi ditambahkan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

“Kita melakukannya dengan pendekatan dan komunikasi untuk memberikan pengetahuan terhadap TPK itu sendiri kemudian terhadap keluarga yang beresiko stunting dan catin”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa TPK Desa Bojong melakukan pendekatan dan memberikan pengetahuan juga kepada anggota TPK agar dapat menyampaikan edukasi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan mengenai manfaat menyusui dan mpasi dengan gizi seimbang agar stunting dapat dicegah. Berdasarkan observasi, peneliti menemukan bahwa dari komunikasi yang terjalin antara anggota TPK Desa Bojong memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat, sehingga dalam melakukan pendekatan terhadap sasaran sudah cukup baik. Namun masih terdapat ibu yang enggan untuk membawa anaknya ke posyandu agar dapat melakukan pengecekan, salah satu faktornya adalah kurangnya pemberian motivasi dari TPK.

Mengenai siapa yang melakukan pengawasan atau pengendalian terhadap TPK Desa Bojong dan bagaimana pengawasan atau pengendalian tersebut dilakukan, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Pengawasan atau pengendalian terhadap TPK Desa Bojong yaitu koordinator TPK Desa, kemudian kecamatan atau UPTD serta Kabupaten. Pengawasan atau pengendalian tersebut dilakukan yaitu mungkin dengan monitoring, pelaporan-pelaporan yang dibuat setiap bulannya.

Informasi yang sama disampaikan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Yang melakukan pengawasan biasanya dilakukan oleh kepala UPTD, pengawasan bisa dilakukan setiap bulan, bisa jadi koordinasi dari setiap tim bisa ke Pak Kades juga dilakukan pengawasannya, atau ya kepada kepala UPTD.

Informasi ditambahkan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

Pengawasannya kita oleh koordinator TPK Desa, kemudian oleh koordinator TPK Kecamatan dan selanjutnya oleh koordinator TPK Kabupaten. Pengawasannya yang dilakukan oleh koordinator TPK Kecamatan dengan melihat hasil pelaporan secara visum dan melihat aplikasi elsimil.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengawasan dilakukan oleh koordinator TPK Desa, Koordinator TPK Kecamatan atau kepala UPTD P5A, hingga koordinator TPK Kabupaten. Pengawasan dilakukan melalui hasil pelaporan data yang diinput ke dalam aplikasi elsimil pada setiap bulannya.

Mengenai akuntabilitas yang dimiliki oleh TPK Desa Bojong, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

“Yaitu saling komunikasi dan berkordinasi serta melaksanakan pendampingan terhadap catin, bumil, pasca salin, terus baduta.”

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

“Akuntabilitas, bisa saling berkoordinasi antar tim dan bertanggungjawab dengan tugas masing-masing, melakukan pelaporan, sosialisasi dan pendampingan.”

Informasi ditambahkan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

“Akuntabilitas yang dimiliki oleh TPK Desa Bojong, menurut saya sejauh ini alhamdulillah kader TPK Desa Bojong bisa bertanggungjawab dan melaksanakan tugas pendampingannya secara baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban TPK Desa Bojong adalah dengan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik serta dapat memberikan laporan kedalam aplikasi elsimil. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa masih terdapat anggota TPK Desa Bojong yang kurang bertanggungjawab terhadap tugasnya, seperti tidak menginput data kedalam aplikasi elsimil pada tepat waktu.

Mengenai bagaimana proses TPK Desa Bojong dalam mengambil keputusan, peneliti melakukan wawancara pada 03 April 2024 dengan Ibu Fatima Erni selaku ketua TP-PKK sekaligus ketua TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

“Yaitu melakukan komunikasi dan musyawarah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.”

Informasi serupa disampaikan oleh Ibu Dini Nurhadini selaku Bidan Desa pada wawancara tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Pengambilan keputusan bisa jadi dengan cara koordinasi dulu apabila ada masalah dan memecahkan masalah tersebut misalnya dengan ada kasus ibu



hamil kek, kita dapat memecahkan masalah dengan pemberian PMT, bisa jadi itu koordinasi juga dengan puskesmas apakah ada PMT untuk ibu hamil kek, atau misalnya untuk balita stunting kita koordinasi untuk pemecahan masalahnya dengan cara pemberian PMT juga, misalnya bisa ke desa atau ke puskesmas juga, barangkali memang ada bantuan-bantuan yang bisa memecahkan permasalahan tersebut.

Informasi yang sama disampaikan oleh Ibu Neni Herawati selaku Kader KB pada wawancara tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

“Untuk mengambil keputusan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Bojong kita melakukan musyawarah dan hasil yang mufakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong yaitu berdasarkan hasil musyawarah dan berkoordinasi mengenai masalah yang sedang dihadapi.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini secara mendalam mengulas terkait koordinasi yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dalam pencegahan stunting, dengan fokus utama pada teknik koordinasi yang efektif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyatakan bahwa salah satu kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Sehingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah membuat Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh desa dan kabupaten di Indonesia.

Koordinasi dalam sebuah organisasi merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatur dan memadukan kepentingan bersama untuk

mencapai suatu tujuan, termasuk dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) koordinasi harus dapat dilakukan dengan efektif agar anggota TPK dapat memberikan pendampingan kepada sasaran sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan demikian, penelitian ini membahas mengenai bagaimana TPK Desa Bojong dalam melakukan koordinasi untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut teori teknik koordinasi yang efektif yang dikemukakan oleh D. Chandra Bose (2021) terdapat enam teknik agar koordinasi berjalan dengan efektif diantaranya yaitu, tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggungjawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan komprehensif, kerja sama, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif.

**Dimensi pertama** yaitu tujuan yang jelas, untuk menunjang koordinasi yang efektif seluruh tujuan yang terdapat dalam organisasi harus diuraikan dengan jelas agar dapat dipahami oleh semua anggota organisasi. Tujuan yang jelas sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam suatu organisasi. Dalam proses koordinasi semua pihak yang terlibat harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai tujuan dari organisasi. Hal ini dikarenakan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat mengarah kepada suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam panduan pelaksanaan pendampingan keluarga untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan yang diterbitkan oleh BKKBN (2021), pendampingan keluarga bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga yang berisiko stunting. Sasaran prioritas meliputi ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak-anak berusia 0-59 bulan, serta semua calon pengantin atau

pasangan usia subur. Pendampingan pra-nikah juga merupakan bagian dari pelayanan pernikahan untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya guna meminimalisir atau mencegah pengaruh dari faktor-faktor penyebab stunting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki tujuan yang spesifik, relevan dan terukur. Tujuan tersebut juga telah diketahui dan dipahami oleh anggota TPK Desa Bojong sehingga TPK Desa Bojong dapat melakukan berbagai upaya yang dapat mencegah dan menurunkan angka stunting di Desa Bojong. Dengan adanya tujuan yang jelas tersebut TPK Desa Bojong dapat melakukan koordinasi terkait upaya apa yang dapat mencapai tujuan dari TPK. Untuk terus melakukan upaya yang mengarah pada pencapaian tujuan, pemerintah terkait beberapa kali mengadakan sosialisasi melalui webinar nasional yang diikuti oleh seluruh Tim Pendamping Keluarga di Indonesia guna meningkatkan pemahaman mengenai tujuan serta upaya yang dapat dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Selain itu pemerintah Kabupaten dan Kecamatan juga melakukan sosialisasi dan pemaparan materi mengenai stunting melalui pertemuan-pertemuan bersama Tim Pendamping Keluarga. Berdasarkan hal tersebut anggota TPK Desa Bojong dapat melakukan upaya pencegahan stunting berdasarkan arahan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan adanya Tim Pendamping Keluarga.

Menurut D. Chandra Bose (2012) tujuan keseluruhan perusahaan harus dijabarkan dengan jelas dan harus dipahami dengan baik oleh setiap orang di perusahaan. Koordinasi dapat dilakukan oleh pemimpin melalui arahan, pedoman,

dan instruksi kepada bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan yang ditugaskan. Sesuai dengan hasil penelitian Niken & Ni Made (2022) bahwa penyampaian edukasi atau arahan kepada anggota TPK dapat mempengaruhi tindakan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melakukan pendampingan dalam upaya pencegahan stunting.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan koordinasi pada aspek tujuan yang jelas dalam TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, ditemukan bahwa TPK Desa Bojong telah melakukan koordinasi terkait dengan tujuan yang jelas dari Tim Pendamping Keluarga yaitu untuk memberikan fasilitas informasi dan pelayanan mengenai stunting melalui pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting agar dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya stunting. Koordinasi mengenai tujuan dari TPK tersebut dilakukan baik itu melalui seminar atau arahan yang dilakukan oleh BKKBN, maupun melalui koordinator TPK tingkat Kecamatan atau pertemuan rutin yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong, sehingga dapat menambah pengetahuan para anggota TPK terkait dengan tujuan yang jelas dari Tim Pendamping Keluarga.

**Dimensi kedua** yaitu, garis wewenang dan tanggungjawab yang jelas yang merupakan salah satu teknik yang paling penting dalam melakukan koordinasi agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Garis wewenang dan tanggungjawab yang jelas dapat menjadi acuan bagi anggota organisasi dalam melakukan pekerjaan, garis wewenang yang jelas menunjukkan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Tim Pendamping

Keluarga (TPK) Desa Bojong melakukan pembagian tugas kerja yang sesuai dengan dengan keahlian anggotanya, yaitu Kader PKK memiliki tugas pendampingan dan sebagai fasilitator pelayanan bagi keluarga atau memfasilitasi pemberian bantuan sosial. Bidan Desa memiliki tugas untuk pendampingan dan pemberi layanan kesehatan. Kader KB memiliki tugas pendampingan dan melakukan pelaporan data yang di input melalui aplikasi elsimil yang digunakan khusus data calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan serta baduta dan balita. Selain itu TPK Desa Bojong memiliki ketua TPK yang memiliki tanggungjawab sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan keluarga. Kemudian Garis wewenang yang dimiliki TPK Desa Bojong bertanggungjawab melaporkan data atau kasus-kasus stunting yang terjadi di Desa Bojong melalui aplikasi elsimil kepada UPTD P5A dan dinas terkait. Dalam panduan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan yang di terbitkan oleh BKKBN (2021), terdapat alur pelaporan yang dilakukan oleh TPK melalui aplikasi dan/atau pelaporan manual kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kelurahan, kemudian disampaikan kepada TPPS Kecamatan/UPTD P5A, setelah itu kepada TPPS Kabupaten, Provinsi, hingga TPPS pusat.

Kemudian tugas dan wewenang TPK Desa Bojong adalah melakukan pendampingan, penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi pemberian bantuan sosial, melakukan pemeriksaan, serta memberikan dukungan kepada catin hingga keluarga beresiko stunting. Untuk melakukan tugas dan wewenang tersebut

TPK Desa Bojong selalu melaksanakan koordinasi terkait bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada garis wewenang yang jelas dari Tim Pendamping Keluarga, namun TPK Desa Bojong telah bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dari TPK mulai dari melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan bayi berusia 0-59 bulan, mengumpulkan data keluarga beresiko stunting, hingga melaporkan data dan kasus kepada dinas terkait melalui laporan secara manual dan menginput data ke dalam aplikasi elsimil. Kemudian, meskipun tidak adanya garis wewenang yang jelas tetapi TPK Desa Bojong tetap melakukan koordinasi mengenai pembagian tugas yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota TPK. Namun garis wewenang harus tetap diperhatikan karena seluruh kegiatan yang terdapat pada TPK memerlukan adanya garis wewenang yang jelas agar koordinasi dapat berjalan dengan semestinya, karena garis wewenang dalam suatu organisasi merupakan suatu yang memastikan bahwa sebuah keputusan dan instruksi berjalan dengan efektif dan efisien.

Hasil penelitian Uliyatul et al. (2022) bahwa anggota Tim Pendamping Keluarga memiliki pengetahuan terkait tugas dan tanggungjawab dari TPK setelah diberikan arahan. Menurut D. Chandra Bose (2012) koordinasi hanya dapat dicapai melalui indikasi yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab. Garis wewenang yang jelas menunjukkan siapa bertanggungjawab kepada siapa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan koordinasi pada aspek garis wewenang dan

tanggungjawab yang jelas dalam TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, ditemukan bahwa TPK Desa Bojong telah melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada masing-masing anggota. Namun peneliti tidak menemukan adanya garis wewenang yang jelas, akan tetapi TPK Desa Bojong telah bertanggungjawab melaporkan data kepada UPTD P5A/TPK Kecamatan dan BKKBN Kabupaten melalui aplikasi Elsimil.

**Dimensi ketiga** langkah selanjutnya untuk mencapai koordinasi yang efektif adalah melalui penerapan program dan kebijakan yang tepat dan komprehensif. Program dan kebijakan yang jelas dan terstruktur dengan baik membantu memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama dan memudahkan pelaksanaan koordinasi. Dengan adanya program yang tepat dalam sebuah organisasi, itu berarti organisasi tersebut telah dirancang sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dengan program yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi tersebut. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN membentuk Tim Pendamping Keluarga di seluruh Desa di Indonesia untuk melaksanakan program pendampingan terhadap terhadap calon pengantin, pendampingan terhadap ibu hamil, dan pendampingan terhadap ibu pasca persalinan serta baduta dan balita guna melakukan percepatan penurunan stunting di seluruh Indonesia.

Program yang terdapat dalam TPK dapat membantu calon ibu untuk mempersiapkan kesehatan mental dan fisiknya agar dapat melahirkan anak yang

sehat dan memiliki perkembangan yang baik juga dengan gizi yang terpenuhi, sehingga anak terhindar dari kondisi stunting. TPK Desa Bojong melaksanakan program pendampingan tersebut dengan berbagai upaya seperti mengunjungi rumah keluarga beresiko stunting, melakukan pemantauan melalui posyandu dan juga memberikan makanan tambahan guna memenuhi kebutuhan gizi pada sasaran. Dengan upaya tersebut TPK Desa Bojong selalu berkoordinasi perihal kasus-kasus yang ditemukan agar dapat melakukan penanganan yang tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPK Desa Bojong melakukan koordinasi mengenai langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, sehingga program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya program tersebut, dapat terindikasi secara dini faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, sehingga TPK Desa Bojong dapat melakukan pencegahan lebih awal agar anak lahir dengan sehat dan tumbuh dengan baik. Dengan terlaksananya program-program tersebut dengan baik maka koordinasi yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong telah berjalan cukup baik.

Sesuai dengan pengertian tim yang dikemukakan oleh Suprianto K, dkk. (2023) bahwa tim merupakan sekelompok individu yang melakukan kerjasama secara terorganisir serta terkoordinasi dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Tim Pendamping Keluarga dibentuk untuk melaksanakan program-program pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting dalam upaya pencegahan stunting.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan koordinasi pada aspek program dan



kebijakan yang tepat dalam TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, ditemukan bahwa TPK Desa Bojong dapat melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program-program pendampingan yang telah ditetapkan.

**Dimensi keempat** yaitu kerjasama, dalam koordinasi perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh kelompok agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam TPK terdapat tiga unsur anggota yaitu Bidan, kader PKK, dan Kader KB. Ketiga unsur anggota tersebut memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga kerjasama sangat perlu dilakukan oleh TPK dalam melaksanakan tugas. Tanpa adanya kerjasama, koordinasi tidak dapat berjalan dengan baik karena kerjasama dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, TPK Desa Bojong memiliki prinsip untuk saling membantu satu sama lain meskipun telah memiliki tugasnya masing-masing. TPK Desa Bojong melakukan kerjasama dengan cara berkoordinasi dan berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan, serta melakukan evaluasi bersama-sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjalin kerjasama yang baik di antara anggota TPK Desa Bojong, dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan TPK Desa Bojong selalu melibatkan seluruh anggota dengan bekerjasama melakukan kegiatan dan upaya yang telah disepakati untuk memberikan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat diartikan koordinasi yang dilakukan oleh TPK Bojong telah berjalan cukup baik. Kerjasama yang dilakukan TPK Desa Bojong dapat meningkatkan kinerja para anggota sehingga

dapat menjalankan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu pencegahan stunting terhadap anak. Selain itu kerjasama juga dapat menjadi motivasi bagi anggota TPK Desa Bojong untuk terus melakukan pendampingan dengan baik serta dapat meningkatkan efektivitas dari upaya yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh D. Chandra Bose (2012) bahwa koordinasi harus dibarengi dengan kerja sama. Dengan demikian koordinasi hanya dapat tercapai jika individu-individu dalam organisasi bersedia saling memantu secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan koordinasi pada aspek kerjasama dalam TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, ditemukan bahwa TPK Desa Bojong telah melakukan kerjasama dengan sukarela membantu anggota lain dalam melaksanakan tugasnya, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar dan program-program dapat dilaksanakan dengan baik.

**Dimensi kelima** yaitu komunikasi yang efektif, koordinasi akan berjalan lancar dengan melakukan komunikasi yang mudah dipahami oleh seluruh anggota dengan menyampaikan pesan secara tepat dan jelas. Untuk mempermudah penyampaian informasi antara anggota organisasi ataupun antara organisasi perlu adanya komunikasi dua arah yang didukung oleh saluran komunikasi yang baik. Hal tersebut sangat penting agar setiap anggota atau organisasi terkait dapat mengetahui informasi dengan tepat dan jelas agar tidak terjadi miskomunikasi.

Selain itu keterbukaan informasi antar anggota dapat memperlancar proses koordinasi yang dilakukan oleh organisasi.

TPK Desa Bojong melakukan komunikasi dua arah melalui ruang obrolan dalam sebuah aplikasi komunikasi, dalam grup tersebut para anggota bebas untuk menyampaikan informasi terkait pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting. TPK Desa Bojong juga rutin melakukan komunikasi melalui pertemuan yang diadakan minimal satu bulan sekali untuk bertukar informasi mengenai tindakan, materi, dan memecahkan masalah dengan berdiskusi bersama-sama. Selain itu TPK Desa Bojong juga selalu melakukan komunikasi pada saat melakukan pendampingan yang dilakukan di posyandu dengan memberikan informasi dan motivasi kepada keluarga beresiko stunting. Komunikasi yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui faktor dari permasalahan yang terjadi, sehingga TPK Desa Bojong dapat mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga beresiko stunting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh TPK Desa Bojong cukup efektif, karena setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan dan menerima informasi, baik itu melalui ruang obrolan aplikasi komunikasi maupun komunikasi secara langsung. Sehingga melalui komunikasi yang dibangun tersebut dapat mempermudah koordinasi yang dijalankan oleh TPK Desa Bojong dan dapat memberikan dampak positif dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh D. Chandra Bose (2012) bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci koordinasi yang baik. Hal ini dapat dicapai melalui kontak pribadi dan saluran komunikasi yang dapat diandalkan. Dalam panduan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan yang diterbitkan oleh BKKBN (2021), pendamping keluarga diarahkan untuk berkoordinasi mengkomunikasikan suatu keadaan tertentu agar dapat mendapat penanganan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan koordinasi pada aspek komunikasi yang efektif dalam TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, ditemukan bahwa TPK Desa Bojong telah melakukan komunikasi yang cukup efektif melalui pertemuan yang rutin dilaksanakan, dan melalui aplikasi ruang obrolan untuk memberikan informasi mengenai pendampingan stunting.

**Dimensi keenam** yaitu kepemimpinan dan pengawasan yang efektif, kepemimpinan yang tepat akan menghasilkan koordinasi yang baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Kepemimpinan yang efektif juga memerlukan kemampuan mengatasi konflik dan kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam proses komunikasi. Selain itu, pengawasan yang tepat sangat penting, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi dapat terarah dan sesuai dengan harapan. Pengawasan yang efektif membantu memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan yang

efektif dalam organisasi memerlukan kemampuan mengawasi dan mengarahkan tim dengan cara yang efektif.

TPK Desa Bojong dipimpin oleh seorang ketua, kemudian pengawasan dilakukan oleh koordinator TPK Desa, Koordinator TPK Kecamatan atau kepala UPTD P5A, hingga koordinator TPK Kabupaten. Pengawasan dilakukan melalui hasil pelaporan data yang diinput ke dalam aplikasi elsimil pada setiap bulannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja anggota TPK Desa Bojong, selain itu dilakukan juga pengarahan melalui webinar ataupun pertemuan TPK se-kecamatan atau se-kabupaten. Dalam menghadapi masalah atau kasus yang ditemukan, TPK Desa Bojong selalu melakukan musyawarah bersama-sama perihal tindakan apa yang dapat diambil, kemudian melaporkan dan meminta saran untuk masalah tersebut kepada koordinator TPK Desa maupun Kecamatan, sehingga tindakan yang dilakukan TPK Desa Bojong diketahui oleh pihak-pihak terkait dan tetap pada jalur yang telah ditentukan. Dalam hal ini ketua TPK melakukan koordinasi kepada para anggota TPK Desa Bojong dan kepada koordinator TPK Desa maupun Kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kepemimpinan dan pengawasan yang efektif dapat berdampak positif terhadap kegiatan koordinasi di dalam TPK Desa Bojong. Kepemimpinan dan pengawasan dapat menjadi acuan bagi TPK Desa Bojong dalam melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penanganan stunting, karena koordinasi yang terjalin dapat berjalan dengan cukup baik.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh D. Chandra Bose (2012) bahwa kepemimpinan yang tepat menjamin koordinasi yang baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan yang tepat sangat penting untuk memandu aktivitas individu kearah yang benar. Seorang pemimpin harus mengetahui kegiatan yang sedang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau tidak, dan jika tidak sesuai rencana dan arahan seorang pemimpin akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja, hal tersebut merupakan suatu koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan koordinasi pada aspek kepemimpinan dan pengawasan yang efektif dalam TPK Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, ditemukan bahwa TPK Desa Bojong memiliki kepemimpinan dan pengawasan dengan cukup baik, terdapat arahan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan baik itu oleh ketua dan anggota TPK Desa Bojong, koordinator TPK Desa dan TPK Kecamatan hingga UPTD P5A.

Koordinasi yang dijalankan oleh TPK Desa Bojong dapat memadukan berbagai tugas anggota TPK, sehingga para anggota TPK dapat mencapai tujuan dari TPK yaitu mencegah stunting yang terjadi pada balita melalui pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, serta ibu menyusui dan bayi berusia 0-59 bulan. TPK Desa Bojong juga berkerjasama menyelesaikan masalah yang ditemui melalui koordinasi yang dilakukan dengan komunikasi yang terbuka. Selain itu TPK Desa Bojong dapat bersama-sama menyelesaikan tugasnya dengan memberikan laporan kepada dinas terkait melalui pelaporan manual dan pelaporan dalam aplikasi elsimil. Secara garis besar TPK Desa Bojong telah

memiliki teknik agar koordinasi yang dilakukan berjalan dengan efektif, karena TPK memiliki tujuan yang jelas, program dan kebijakan yang tepat, kerjasama, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan dan pengawasan yang jelas. Meskipun belum adanya garis wewenang yang jelas, namun tugas dan tanggungjawab TPK sudah jelas tertera dalam buku panduan yang diterbitkan oleh BKKB. Dengan begitu TPK Desa Bojong dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku panduan tersebut, sehingga TPK Desa Bojong dapat berkoordinasi untuk memadukan beberapa tugas dan tanggungjawabnya agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya TPK yaitu melakukan pencegahan stunting dengan cara memberikan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting.

